

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DI KANTOR PEMERINTAH DESA BANDAR JAYA  
KECAMATAN SEKAYU**

**Ahmad Irfansyah**  
Institut Rahmadiyah Sekayu  
Email : [irfansyahahmad2@gmail.com](mailto:irfansyahahmad2@gmail.com)

**ABSTRAC**

*This study aims to analyze and describe financial performance at the Bandar Jaya Village Government Office, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency in terms of Village Budget Realization (APBDes). The data used in this study was data for fiscal year 2021-2023. The data collection techniques used in this study are interviews conducted by village heads and village office staffs related to the financial management of the Bandar Jaya Village Office and documentation in the form of financial documents, in the range of year 2021-2023 Bandar Jaya Village Office Budget Realization Report. In results showed that the overall financial performance of the village in the Bandar Jaya Village Government Office, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency could be categorized as economic, but inefficient and ineffective.*

Keyword : *Analysis financial Perfomance of Village, Revenue and Expenditure Budget For Fiscal Years 2021-2023*

**I. PENDAHULUAN**

Kota berbadan hukum adalah entitas geografis yang berbeda secara hukum dengan kekuasaan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebuah desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terikat wilayah dengan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri dan kepentingan masyarakat lokalnya sesuai dengan kebijakan dan praktik yang diinisiasi masyarakat. serta hak-hak adat. Pemerintah kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati hak-hak warganya. Otonomi desa mengacu pada kemampuan masyarakat untuk membentuk dan menjalankan pemerintahannya sendiri.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai kemampuan desa. Laporan realisasi anggaran desa (APBDes) mengevaluasi kinerja keuangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Anggaran desa menunjukkan alokasi dana publik dan penggunaan dana tersebut secara ekonomis, efisien, dan berhasil.

Rencana keuangan tahunan pemerintah desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran tersebut diselesaikan dengan tata cara desa yang membahas aspek pendapatan, belanja, dan keuangan, setelah melalui proses kolaboratif antara pengurus desa dan kelompok konsultatif. Dengan tetap berpegang pada persyaratan hukum, pemerintah desa harus mengelola keuangan desa secara metodis dengan mengutamakan kepentingan warga sekitar dan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Desa Bandar Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Sekayu yang setiap tahunnya mendapat dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk memfasilitasi peningkatan pembangunan. Pemeriksaan APBDes diperlukan untuk menilai sejauh mana administrasi anggaran desa di desa Bandar Jaya berkontribusi terhadap kinerja keuangan yang optimal. Dalam perumusan anggaran, selalu ada asumsi estimasi yang menyimpang dari outcome aktual selama pelaksanaan anggaran. Mengkaji dengan jelas anggaran tentang kinerja keuangan tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Tabel 1.  
Rekapitulasi Anggaran  
Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2021 s/d 2023  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja		Capaian	
	Anggaran	Realisasi	(Rupiah)	(%)
2021	2.187.623.249,74	2.149.863.198,00	37.760.051,74	98,27%
2022	2.255.103.732,42	2.141.492.932,00	113.610.800,42	94,96%
2023	2.573.593.557,00	2.468.462.510,00	105.131.047,00	95,91%

*Sumber : Pemerintahan Desa Bandar Jaya, 2025, Data Diolah*

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kinerja anggaran pemerintah desa Bandar Jaya paling rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2023, hanya mencapai 94,96% dari target. Dapat disimpulkan bahwa beberapa rencana dan kegiatan belum dilaksanakan atau dibatalkan. Kesenjangan antara anggaran dan belanja aktual baik anggaran desa maupun anggaran pemerintah desa Bandar Jaya

mencontohkan tanggung jawab keuangan pemerintah desa Bandar Jaya terhadap kinerja keuangan pemerintah.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai seluruh hak dan kewajiban moneter, termasuk pendapatan, pengeluaran pembiayaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa, serta seluruh aset moneter dan material yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan mengikuti prinsip keterbukaan, tanggung jawab, keterlibatan, dan penganggaran yang ketat, urusan keuangan desa ditangani:

- a) Gagasan transparansi adalah untuk memastikan bahwa semua warga desa dapat melihat bagaimana pemerintah desa mereka bekerja, kebijakan apa yang sedang dibuat, dan hasil apa yang telah dicapai.
- b) Pemerintah desa harus menanggapi dan menjelaskan tindakan dan kinerjanya kepada setiap warga desa yang memiliki hak hukum untuk meminta informasi ini sebagai bagian dari tanggung jawab akuntabilitasnya.
- c) "Partisipatif" berarti bahwa semua penduduk desa memiliki pendapat yang sama tentang bagaimana pemerintah daerah mereka berencana menggunakan uang pajak mereka.
- d) Penyelenggaraan keuangan desa harus sistematis dan tertata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menguasainya.

### **Konsep Kinerja Keuangan Desa**

Sumber daya manusia di desa memfasilitasi sistem tata kelola, pengabdian masyarakat, dan pertumbuhan desa. Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi ekonomi daerah. Memahami peran pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan daerah dan melihat keterkaitan masing-masing sumber pembangunan dalam proses pelaksanaannya.

### **Indikator Kinerja Keuangan**

Istilah "indikator kinerja" digunakan oleh Bastian (2016: 267) untuk mendefinisikan indikasi terukur yang menunjukkan seberapa baik suatu tujuan atau sasaran telah terpenuhi. Indikator-indikator ini meliputi input, output, hasil, manfaat, dan efek :

1. Input indikator mencakup semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasi yang memberikan indikasi keluaran.  
kinerja keuangan berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan peundang-undangan dan sebagainya,
2. Indikator Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik.
3. Indikator Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
6. Untuk mengevaluasi kinerja pada setiap titik waktu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian pasca-aktivitas, indikator kinerja harus dapat diukur. Organisasi pemerintah juga dapat menggunakan indikator kinerja untuk melacak kemajuan mereka menuju tujuan.

### **Analisis Kinerja Keuangan Desa**

Analisis kinerja keuangan desa melibatkan evaluasi dan penilaian terhadap keadaan keuangan desa, termasuk pendapatan, belanja, dan pos-pos keuangan lainnya. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat dianalisis dalam kinerja keuangan desa:

- a). Pendapatan Desa: Analisis pendapatan desa melibatkan penilaian terhadap sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh desa, seperti pajak desa, retribusi, dana desa, atau sumber pendapatan lainnya.

- b). Belanja Desa: Analisis belanja desa melibatkan penilaian terhadap penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan dan program di desa. Dalam analisis ini, dapat dievaluasi pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, program sosial, dan lainnya.
- c). Keseimbangan Keuangan: Analisis keseimbangan keuangan desa melibatkan penilaian terhadap keseimbangan antara pendapatan dan belanja desa.
- d). Rasio Keuangan: Analisis rasio keuangan melibatkan penggunaan berbagai indikator keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan desa.
- e). Belanja Desa: Analisis belanja desa melibatkan penilaian terhadap penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan dan program di desa
- f). Keseimbangan Keuangan: Analisis keseimbangan keuangan desa melibatkan penilaian terhadap keseimbangan antara pendapatan dan belanja desa. Evaluasi apakah desa mengalami surplus atau defisit dalam keuangan.
- g). Rasio Keuangan: Analisis rasio keuangan melibatkan penggunaan berbagai indikator keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan desa.

### **Analisis Rasio Keuangan**

Menurut Haryoko (2020: 72), analisis rasio keuangan melibatkan pemeriksaan berbagai estimasi dalam laporan keuangan melalui penggunaan rasio keuangan. Penggunaan rasio keuangan regional sebagai teknik untuk Analisis Kinerja Keuangan melibatkan perbandingan hasil keberhasilan satu periode dengan periode sebelumnya untuk melihat tren yang berlaku.

#### **1. Rasio Ekonomis**

Rasio ekonomi membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan. Anggaran pemerintah desa dinilai irit jika rasio ekonominya mencapai 100%. Rasio ekonomi ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Tabel 2  
Skala Kriteria Rasio Ekonomis

No	Skala	Kriteria
1	>100%	Sangat Ekonomis
2	84 s.d 100%	Ekonomis

No	Skala	Kriteria
3	65 s.d 83%	Cukup Ekonomis
4	< 65%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mahmudi, 2015

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi mengukur output relatif terhadap input sesuai dengan kriteria atau tujuan kinerja yang ditetapkan. Rasio efisiensi ditentukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3  
Skala Kriteria Rasio Efisiensi

No	Skala	Kriteria
1	< 90%	Sangat Efisiensi
2	90 s.d 99%	Efisiensi
3	100%	Cukup Efisiensi
4	>100%	Tidak Efisiensi

Sumber : Mahmudi, 2015

## 3. Rasio Efektivitas

Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian hasil program relatif terhadap tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah evaluasi hasil relatif terhadap keluaran. Rasio efektivitas ditentukan dengan menggunakan metode :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.  
Skala Kriteria Efektivitas

No	Skala	Kriteria
1	< 90%	Sangat Efektif
2	90 s.d 99%	Efektif
3	100%	Cukup Efektif
4	>100%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2015

## Konsep Pendapatan

Sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02 dan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, pendapatan didefinisikan sebagai setiap

dana yang diterima oleh kas negara atau kas negara daerah yang menambah saldo anggaran sepanjang tahun anggaran dan terutang kepada pemerintah tanpa memerlukan pelunasan.

Penghasilan yang diterima desa, sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, merupakan hak desa untuk disimpan selama satu tahun anggaran dan tidak dapat diganti oleh masyarakat.

### **Pendapatan Transfer Desa**

Pendapatan Pindahan Desa adalah uang yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri dari:

Dana desa merupakan sumber keuangan yang dialokasikan dari APBN khusus desa, yang disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota untuk mendukung kegiatan pemerintahan, inisiatif pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Bagi hasil pajak daerah, kabupaten, dan kota, bersama dengan pungutan daerah, merupakan uang yang diperoleh melalui bagi hasil pajak dan pungutan daerah. Desa dialokasikan 10% dari pembagian bagi hasil pajak dan pungutan daerah.
2. APBDes merupakan alokasi keuangan yang disediakan kabupaten untuk desa dan merupakan bagian dari total uang yang diterima pemerintah kabupaten untuk desa.
3. Dukungan keuangan provinsi, kabupaten, atau kota mengacu pada dana yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah provinsi atau kota, yang diperoleh dari anggaran masing-masing, termasuk bantuan umum dan khusus.

### **Konsep Belanja Desa**

Kata 'belanja desa' terdiri dari setiap pengeluaran keuangan dari rekening desa yang menjadi kewajiban desa dalam satu tahun anggaran, yang tidak akan dilunasi oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan desa. Belanja Desa meliputi :

- a. Domain Tata Kelola Desa Belanja mencakup banyak kategori, yaitu :
  1. Pendapatan dan tunjangan yang ditetapkan meliputi pengeluaran staf, termasuk gaji yang ditetapkan kepala desa, tunjangan, dan tunjangan BPD.
  2. Operasi kantor meliputi pengadaan produk dan layanan. Misalnya pengadaan alat tulis kantor, perbekalan, pemeliharaan, percetakan, sewa kantor desa, sewa peralatan kantor, honorer untuk narasumber atau tenaga ahli, operasional pemerintahan desa, operasional BPD, dan pengeluaran serupa.
- b. Belanja semacam ini digunakan untuk pembangunan desa. Contoh peningkatan irigasi, permukaan jalan, dan inisiatif lainnya.
- c. Kategori belanja Bidang Bina Lingkungan Desa ini digunakan untuk kemajuan masyarakat perdesaan. Misalnya, pembiayaan untuk pelatihan peralatan desa dan uang untuk program taruna.
- d. Metode pembelian ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Misalnya, pembiayaan untuk Pengelolaan Lingkungan dan pengelolaan limbah otonom.
- e. Kategori pembelian tak terduga digunakan untuk pembelian tak terduga. Kegiatan darurat dialokasikan dana untuk pengeluaran tak terduga, seperti inisiatif sosial terkait bencana.

### **Jenis Belanja Pemerintah Desa**

Belanja Pemerintah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi yaitu sebagai berikut :

1. Klasifikasi belanja pemerintah menurut organisasi menunjukkan bahwa anggaran disalurkan kepada organisasi berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah. Kategorisasi ini, menurut organisasi, tidak termasuk dalam lembar muka laporan keuangan tetapi dirinci dalam catatan yang menyertai laporan keuangan.
2. Kategorisasi pengeluaran berdasarkan fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut Pelayanan Publik, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan, Perumahan dan Infrastruktur Publik, Kesehatan, Pariwisata dan Kebudayaan, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial.

3. Klasifikasi menurut ekonomi mengkategorikan pengeluaran menurut sifat pembeliannya, termasuk jenis-jenis berikut.t :
  - a. Belanja Operasi  
pengeluaran operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk tugas-tugas rutin yang memberikan manfaat jangka pendek, termasuk kompensasi staf, pengadaan komoditas, pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan biaya operasional lainnya.
  - b. Belanja Modal  
Belanja modal adalah pengeluaran uang untuk pembelian aset tetap atau aset lain dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

Berdasarkan postpositivisme, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji benda-benda dalam keadaan alaminya, bukan dalam lingkungan yang terkendali atau selama percobaan, dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi nilai dari satu atau lebih variabel bebas tanpa membandingkannya dengan variabel lain atau mengaitkannya dengan konsep lain. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan disusun dan disajikan secara jelas dan ringkas, sehingga memudahkan berbagi informasi yang paling penting.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder. Studi ini memanfaatkan sumber data sekunder, seperti laporan pelaksanaan anggaran dan dokumen resmi lainnya, karena mengambil informasinya dari materi yang telah diproses oleh otoritas terkait.

Penulis penelitian menggunakan data kualitatif. Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Kabupaten Banyuasin laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2021-2023 berisi data kualitatif yaitu data sekunder deskriptif atau deskriptif. Salah satu teknik pengumpulan informasi untuk penyelidikan ini adalah dokumentasi data. Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan laporan realisasi anggaran (LRA) Kabupaten Musi Banyuasin

tahun anggaran 2021-2020 merupakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi keadaan implementasi saat ini di sektor keuangan sedang dilakukan dalam penelitian ini. Dinas pemerintahan desa Bandar Jaya Kabupaten Sekayu menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan APBD desa.

APBDes atau laporan realisasi anggaran desa menjadi sumber data penelitian ini. Dengan angka-angka tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang kesehatan anggaran dinas desa Bandar Jaya di Kabupaten Sekayu selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut adalah hasil pengukuran rasio:

##### **Rasio Ekonomis**

Dinas Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu menggunakan rasio ekonomi untuk mengetahui derajat pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Pengeluaran yang direalisasikan sebagai persentase dari pengeluaran yang dianggarkan dikenal sebagai rasio ekonomi. Jika rasio ekonomi anggaran pemerintah desa adalah 100%, maka dapat dianggap ekonomis.

Tabel 5 di bawah ini menunjukkan statistik anggaran dan realisasi pemerintah desa Bandar Jaya di Kabupaten Sekayu, berdasarkan metode perhitungan rasio ekonomi. :

Tabel 5.  
Anggaran dan Realisasi  
Belanja Pemerintah Desa  
Bandar Jaya Tahun  
Anggaran 2021-2023  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja	
	Anggaran	Realisasi
2021	2.187.623.249,74	2.149.863.198,00
2022	2.255.103.732,42	2.141.492.932,00

Tahun	Belanja	
	Anggaran	Realisasi
2023	2.573.593.557,00	2.468.462.510,00

*Sumber : Pemerintahan Desa Bandar Jaya, 2025, Data diolah*

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu tahun 2021-2023 :

a) Tahun anggaran 2021

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Rp. 2.149.863.198,00}}{\text{Rp.2.187.623.249,74}} \times 100\% = 98,27\%$$

b) Tahun anggaran 2022

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Rp. 2.141.492.932,00}}{\text{Rp. 2.255.103.732,42}} \times 100\% = 94,96 \%$$

c) Tahun anggaran 2023

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Rp. 2.468.462.510,00}}{\text{Rp. 2.573.593.557,00}} \times 100\% = 95,91\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan rasio ekonomis Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu tahun anggaran 2021-2023 pada Tabel 6. di bawah ini :

Tabel 6.  
Rekapitulasi Rasio Ekonomis Pemerintah Desa Bandar  
Jaya Tahun Anggaran 2021-2023  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi (Rp)	Rasio Ekonomis (%)	Keterangan
2021	2.187.623.249,74	2.149.863.198,00	98,27%	Ekonomis
2022	2.255.103.732,42	2.141.492.932,00	94,96%	Ekonomis
2023	2.573.593.557,00	2.468.462.510,00	95,91%	Ekonomis

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6. di atas dapat dilihat bahwa perhitungan rasio ekonomis menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu yang dihitung menggunakan rasio ekonomis pada tahun 2021 s/d 2023 termasuk dalam kategori ekonomis, karena hasil rasio selama 3 (tiga) tahun tersebut berada di bawah 100%. Rasio ekonomis pada tahun 2021 sebesar 98,27% dimana kriteria rasio tersebut menunjukkan ekonomis, tetapi tidak terserapnya anggaran sebesar 1,73% dikarenakan adanya kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan desa khususnya sub bidang pariwisata yang belum terealisasi sepenuhnya. Berdasarkan data realisasi APBDes sub bidang pariwisata mendapatkan alokasi sebesar Rp.217.053.600,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp.185.053.600,00 dan selisih sebesar Rp.32.000.000,00.

Rasio ekonomis pada tahun 2022 sebesar 94,96% dimana kriteria rasionalnya menunjukkan ekonomis, tetapi tidak terserapnya anggaran sebesar 5,04% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya. *Pertama*, pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa khususnya di penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan. Informasi berikut diperoleh dari data realisasi APBDes: penyisihan dialokasikan sebesar Rp.709.591.732, 00, namun hanya Rp.660.140.932, 00 benar-benar terealisasi, menyisakan selisih sebesar Rp.49,450,800,00. Kedua, dalam ranah pendidikan khususnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan perdesaan. Berdasarkan hasil APBDes, sub-divisi pendidikan diberi anggaran sebesar Rp.30.720.000, 00 namun hanya berhasil menghimpun Rp.23.520.000, 00, menyisakan defisit sebesar Rp.7.200.000.00. Terakhir, dalam ranah pengembangan masyarakat, khususnya dalam subbidang budaya dan keagamaan. Menurut statistik dari APBDes, sub-divisi kebudayaan dan agama seharusnya mendapatkan Rp.70.000.000, 00 namun

hanya berhasil menghimpun Rp.62.850.000, 00, menyisakan selisih sebesar Rp.7.350.000.00. Wilayah keempat adalah pengembangan kapasitas aparatur desa di subbidang pertanian dan bidang pemberdayaan masyarakat secara lebih umum.

Ada perbedaan sebesar Rp.7.900.000, 00 antara Rp.201.820.000, 00 benar-benar dihabiskan dan Rp.209.720.000, 00 dialokasikan untuk subsektor pertanian dan pertanian oleh APBDes. Sub bidang peningkatan kapabilitas aparatur desa memiliki alokasi sebesar Rp.151.910.000, 00, namun hanya Rp.110.200.000, 00 benar-benar tercapai, menyisakan selisih Rp.41.710.000,00.

Rasio ekonomis pada tahun 2023 sebesar 95,91% dimana kriteria rasionalnya menunjukkan ekonomis, tetapi tidak terserapnya anggaran sebesar 4,09% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya. Untuk memulainya, menurut data yang diberikan APBDes, pemerintah desa seharusnya mendapatkan Rp.1.061.379.157, 00 untuk audiensi, namun baru mendapat Rp.981.193.210.00, menyisakan selisih sebesar Rp.80.185.947,00. Kedua, dalam ranah pelaksanaan pembangunan desa, khususnya pada sub sektor kesehatan dan pendidikan. Sub-divisi pendidikan dialokasikan sebesar Rp.34.000.000, 00 namun hanya mendapat Rp.33.040.000, 00, mengakibatkan selisih sebesar Rp.960.000.00, menurut statistik dari APBDes. Pada saat yang sama, sub sektor kesehatan hanya mampu mengalokasikan Rp.75.650.000, 00, menyisakan selisih sebesar Rp.4.625,000,000.00. Ketiga, aparatur desa di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya di subbidang kelautan dan perikanan serta bidang pengembangan kapasitas. Sama sekali tidak ada realisasi dari Rp.16.860.000, 00 dialokasikan untuk Sub Divisi Kelautan berdasarkan realisasi data APBDes. Pada saat yang sama, sub-divisi yang bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas aparatur desa hanya mampu mengumpulkan Rp.112.120.000.00, menyisakan selisih sebesar Rp.2,500.000.00.

### **Rasio Efisiensi**

Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa suatu sistem dapat memenuhi tujuan kinerjanya dengan sedikit sumber daya yang digunakan. Agar

dianggap efisien, kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) harus berada di bawah rasio efisiensi 100%.

Tabel 7 di bawah ini menunjukkan statistik penulis terhadap realisasi pendapatan dan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Sekayu yang didasarkan pada metode perhitungan rasio efisiensi :

Tabel 7.  
Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja  
Pemerintah Desa Bandar Jaya Tahun Anggaran 2021-2023  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2021	2.072.683.776,42	2.149.863.198,00
2022	2.242.902.415,00	2.141.492.932,00
2023	2.466.625.087,00	2.468.462.510,00

Sumber : Pemerintahan Desa Bandar Jaya, 2025, Data diolah

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu tahun 2021-2023 :

a) Tahun anggaran 2021

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp.2.149.863.198,00}}{\text{Rp.2.072.683.776,42}} \times 100\% = 103,72 \%$$

b) Tahun anggaran 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp. 2.141.492.932,00}}{\text{Rp. 2.242.902.415,00}} \times 100\% = 95,47 \%$$

c) Tahun anggaran 2023

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rp.2.468.462.510,00}}{\text{Rp.2.466.625.087,00}} \times 100\% = 100,07 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu tahun anggaran 2021-2023 pada Tabel 8. di bawah ini :

Tabel 8.  
Rekapitulasi Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Bandar  
Jaya Tahun Anggaran 2021-2023  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi (Rp)		Rasio Efisiensi %	Keterangan
	Pendapatan	Belanja		
2021	2.072.683.776,42	2.149.863.198,00	103,72%	Tidak Efisiensi
2022	2.242.902.415,00	2.141.492.932,00	95,47%	Efisiensi
2023	2.466.625.087,00	2.468.462.510,00	100,07%	Tidak Efisiensi

*Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 8. di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintahan Desa Bandar Jaya pada tahun 2021 sebesar 103,72% dimana kriteria rasionya menunjukkan tidak efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan. Berdasarkan data APBDes dapat diketahui bahwa jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp.2.072.683.776,42 sementara jumlah realisasi belanja Rp.2.149.863.198,00, selisih ini menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp.77.179.421,58. Ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh penggunaan dana dari sumber pembiayaan sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Rasio efisiensi pada tahun 2022 sebesar 95,47% dimana kriteria rasionya menunjukkan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Bandar Jaya mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan serendah-rendahnya. Kinerja keuangan dapat dikatakan efisiensi apabila rasio efisiensinya kurang dari 100% atau semakin kecil rasio efisiensi yang dicapai, maka kinerjanya semakin baik. Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sepenuhnya seperti di bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan keagamaan, bidang pertanian dan perternakan, serta bidang peningkatan kapasitas aparatur desa yang mempengaruhi rendahnya angka belanja.

Rasio efisiensi pada tahun 2023 sebesar 100,07% dimana kriteria rasionya menunjukkan tidak efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan. Berdasarkan data APBDes dapat diketahui bahwa

jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp.2.466.625.087,00 sementara jumlah realisasi belanja Rp.2.468.462.510,00. Selisih ini menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp.1.837.423,00. Ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh penggunaan dana dari sumber pembiayaan sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

### **Rasio Efektivitas**

Berdasarkan rumus perhitungan rasio efektivitas, Penulis sajikan data tentang anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu pada Tabel 9. di bawah ini :

Tabel 9.  
Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan  
Pemerintah Desa Bandar Jaya  
Tahun Anggaran 2021-2023 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2021	2.071.553.798,00	2.072.683.776,42
2022	2.217.342.932,00	2.242.902.415,00
2023	2.489.323.232,00	2.466.625.087,00

*Sumber : Pemerintahan Desa Bandar Jaya, 2025, Data diolah*

Berdasarkan rumus dan data di atas, berikut ini disajikan perhitungan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu tahun 2021-2023 :

a) Tahun anggaran 2021

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp.2.072.683.776,42}}{\text{Rp.2.071.553.798,00}} \times 100\% = 100,05 \%$$

b) Tahun anggaran 2022

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp.2.242.902.415,00}}{\text{Rp.2.217.342.932,00}} \times 100\% = 101,15\%$$

c) Tahun anggaran 2023

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp.2.466.625.087,00}}{\text{Rp.2.489.323.232,00}} \times 100\% = 99,08\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun rekapitulasi hasil perhitungan rasio efisiensi Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu tahun anggaran 2021-2023 pada Tabel 10. di bawah ini :

Tabel 10.  
Rekapitulasi Rasio Efektivitas  
Pemerintahan Desa Bandar Jaya  
Tahun Anggaran 2021-2023 (Dalam  
Rupiah)

Tahun	Pendapatan (Rp)		Rasio Efektivitas %	Keterangan
	Anggaran	Realisasi		
2021	2.071.553.798,00	2.072.683.776,42	100,05%	Tidak Efektif
2022	2.217.342.932,00	2.242.902.415,00	101,15%	Tidak Efektif
2023	2.489.323.232,00	2.466.625.087,00	99,08%	Efektif

*Sumber : Data Sekunder Diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 10. di atas, dapat dilihat bahwa perhitungan rasio efektivitas Pemerintahan Desa Bandar Jaya pada tahun 2021 sebesar 100,05% dimana kriteria rasionya menunjukkan tidak efektif. Pemerintah Desa Bandar Jaya mengalokasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.2.071.553.798,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.072.683.776,42. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan melebihi anggaran pendapatan. Meskipun secara nominal terlihat positif, namun secara perencanaan hal ini menunjukkan tidak efektif karena terdapat perbedaan antara pendapatan yang direncanakan dengan yang direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya penerimaan tak terduga seperti bunga bank.

Rasio efektivitas pada tahun 2022 sebesar 101,15% dimana kriteria

rasionya menunjukkan tidak efektif. Pemerintah Desa Bandar Jaya mengalokasikan anggaran pendapatan sebesar Rp.2.217.342.932,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.242.902.415,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendapatan. Hal ini disebabkan adanya penerimaan tak terduga seperti bunga bank.

Rasio efektivitas pada tahun 2023 sebesar 99,08% dimana kriteria rasionya menunjukkan efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas berada di bawah 100%, yang artinya realisasi pendapatan sudah dilakukan secara tepat, sehingga kinerja keuangan Pemerintahan Desa Bandar Jaya pada tahun 2023 menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **V. SIMPULAN**

Pemeriksaan kinerja keuangan APBD desa di Kantor Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu dipaparkan pada bab sebelumnya. Telah ditentukan bahwa :

1. Kantor Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu memiliki rasio perekonomian sebesar 98,27% pada tahun 2021-2023, 94,96% pada tahun 2022-2023, dan 95,91% pada tahun 2023. Rasio ini memiliki nilai ekonomis, sehingga Pemerintah desa Bandar Jaya telah melakukannya dengan cukup baik sesuai dengan indikator rasio ekonomi, karena telah menangani anggaran dengan baik dari tahun 2021-2023.
2. Pada tahun 2021, pemerintah desa Bandar Jaya mencapai rasio efisiensi yang mengesankan sebesar 103,72%, menunjukkan kinerja yang tinggi. Penurunan sebesar 95,47 persen terjadi pada tahun 2022. Nilainya meningkat sebesar 100,07% pada tahun 2023. Meskipun rasio efisiensi kurang dari 100% pada tahun 2022, namun lebih dari 100% pada tahun 2021 dan 2023, menunjukkan bahwa pemerintah desa Bandar Jaya mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang dihasilkan. Dari apa yang kita lihat, kinerja keuangan pemerintah desa Bandar Jaya sudah tidak efisien. Ini menyiratkan bahwa mereka telah gagal memaksimalkan target mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang

- mereka miliki. Suatu organisasi dianggap efisien jika rasionya kurang dari 100% atau jika kinerjanya lebih efisien karena rasionya menjadi lebih kecil.
3. Rasio efektivitas pada Pemerintah Desa Bandar Jaya tahun anggaran 2021-2023 dengan nilai rasionya 100,05%, 101,15% dan 99,08%. Rasio efektivitas dapat dikatakan efektif apabila persentase rasionya <100%. Semakin kecil rasio efektivitas yang didapatkan, maka semakin baik kinerja keuangan organisasi tersebut. Dapat dilihat berdasarkan hasil pengamatan rasio efektivitas Pemerintah Desa Bandar Jaya dari tahun 2021 s/d 2022 berada di atas 100% yang berarti tidak efektif. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan. Pada tahun 2023 Pemerintah Desa Bandar Jaya justru mengalami penurunan sebesar 99,08%, artinya kinerja keuangan pada tahun 2023 tersebut efektif dibandingkan tahun sebelumnya.
  4. Kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintahan Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu melalui hasil rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas berdampak positif terhadap pembangunan desa. Pencapaian tersebut mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur desa, memperbaiki perekonomian masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdullah. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Handayani, Siska. Melisa Oktavia Putri, dkk. 2024. Analisis Laporan Realisasi APBD pada Kantor Pemerintahan di Kota Bekasi tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)* p-ISSN : 2621-4547 e-ISSN : 2723-7478 Volume 7 Nomor 2, Oktober 2024, 279-286. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Handoko Abdurahan Wiro. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya*. Skripsi Universitas Muhammadiyah : Surabaya.
- Haryoko. 2020. Analisis Rasio Keuangan. Sebagai alat ukur kinerja keuangan pada PT. Pelat Timah Nusantara. Tbk. *Jurnal Ilmiah Feasible Bisnis Kewirausahaan dan workshop* ISSN : 2829-9701 Volume 2 Nomor 1.

2023, 77-84. Universitas Negeri Makassar.

Huda Nurul. 2023. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari*. Skripsi Universitas Jambi.

Mahmudi. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

Mahsun. Mohamad. 2018. *Pengukuran kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Nordiawan dan Ayuningtyas. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Runtu Andre P. Tulango Tree. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Minahasa*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung Alfabeta.